



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com




Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Air Tanah

Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pajak Air Tanah. 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pajak Air Tanah.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Menguasai Komputer. 2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik. 3. Memahami Dengan Baik Prosedur Pengangsuran dan Penundaan Pajak Air Tanah. 4. Disiplin Dan Bertanggungjawab. 5. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
Keterkaitan : 1. Bupati. 2. Kepala BAPENDA. 3. Petugas Pelayanan. 4. Wajib Pajak.	Peralatan/Perlengkapan : 1. Dokumen pendukung pengangsuran dan penundaan pajak. 2. Komputer Set 3. Jaringan Internet. 4. Printer.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
			Kepala BAPENDA	Bupati	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala BPKD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.				rekening koran perusahaan dan SPTPD.	14 hari	rekening koran perusahaan selama 3 bulan terakhir dan SPTPD.	
2.	BAPENDA melakukan penelitian terhadap dokumen sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian persetujuan.				rekening koran perusahaan dan SPTPD.	14 hari	Meneliti rekening koran perusahaan selama 3 bulan terakhir dan SPTPD.	
3.	Bupati dapat memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak menerima Surat Permohonan.					90 hari		
	Jumlah Waktu					118 hari		